

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya tingkat kemiskinan menimbulkan dampak signifikan pada beragam aspek kehidupan sosial masyarakat. Dalam bidang Pendidikan, kemiskinan menghalangi banyak anak untuk mengakses pendidikan yang baik karena orang tua mereka kesulitan dalam membiayai kebutuhan sekolah. Hal ini mengakibatkan anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki kesempatan yang terbatas dalam memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk keluar dari garis kemiskinan. Sementara itu, dalam sektor kesehatan, kemiskinan seringkali menjadi penyebab keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kemiskinan juga memberi dampak dalam aspek-aspek lain, akan tetapi memberantas masalah kemiskinan tak semudah membalikkan telapak tangan. Kemiskinan merupakan suatu masalah multidimensi, sehingga dalam menanggulangnya memerlukan penanganan yang kompleks dan persoalan kemiskinan tidak semata-mata terkait dengan hubungan kausalitas, melainkan juga melibatkan dimensi nilai, preferensi, serta politik. (Khomsan dkk., 2015)

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada September tahun 2024 mencapai sekitar 24,06 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan dari pada tahun sebelumnya sebesar 1,84 juta orang, namun angka ini masihlah dapat dikatakan tinggi. Jutaan penduduk Indonesia hingga kini masih berada pada kondisi hidup di bawah garis kemiskinan. Sehingga hal tersebut masihlah menjadi pr untuk pemerintah (BPS, 2024).

Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan, baik dengan skala nasional ataupun lokal. Diantara program tersebut yang sudah dikenal di masyarakat antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program subsidi lainnya. Namun, kenyataannya, program-program tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, misalnya keterbatasan anggaran, akurasi data penerima manfaat dan proses pendaftaran yang sulit.

Dari banyaknya program pengentasan kemiskinan yang telah dihadirkan oleh pemerintah tidak sedikit masyarakat miskin yang tidak terjangkau sama sekali oleh program-program bantuan tersebut. Keadaan tersebut dimungkinkan karena individu yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun akibat faktor teknis lainnya. Sehingga akhirnya terdapat kelompok rentan yang seharusnya dan berhak menerima bantuan justru terlewatkan.

Kondisi ini juga ditemukan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi, jumlah keluarga yang belum terintervensi oleh program bantuan sosial cukup signifikan. Untuk menjelaskan, akan disajikan pada tabel berikut di bawah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masyarakat miskin yang belum diintervensi program bantuan di Bukittinggi, data dan penjelasan terkait akan disajikan secara singkat pada tabel dibawah.

Tabel 1. 1
Data Jumlah DTKS dan Penerima Bantuan Kota Bukittinggi

Tahun	DTKS	Jumlah penerima bantuan pusat	Jumlah penerima bantuan daerah	Belum diintervensi bantuan
2021	11.030 KK	2.353 KK	679 KK	7.998 KK
2022	12.510 KK	2.943 KK	991 KK	8.576 KK
2023	10.300 KK	2.175 KK	325 KK	7.800 KK

Sumber: Data Arsip Dinas Sosial Kota Bukittinggi, 2024

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi, terdapat ribuan keluarga yang hingga kini belum terjangkau oleh pelaksanaan program bantuan. Selama tiga tahun terakhir, jumlah keluarga yang tidak mendapatkan bantuan, meskipun sudah terdaftar dalam DTKS, jumlahnya masih tetap tinggi. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebanyak 8.576 KK yang belum menerima bantuan sama sekali. Sementara pada tahun 2021 terdapat 7.998 KK, dan di tahun 2023 masih ada 7.800 KK yang tidak terintervensi.

Sebagai respons atas situasi tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi meluncurkan program Baling Bambu (Bantu Sekeliling Bantu Semampumu) pada tahun 2023. Program ini hadir sebagai upaya alternatif yang mengedepankan solidaritas sosial, partisipasi warga, serta kolaborasi berbagai pihak dalam membantu masyarakat miskin secara langsung. Program ini resmi disahkan lewat Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-210-2023.

Selain dilatarbelakangi tindak lanjut untuk masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sama sekali, program ini juga dilatarbelakangi oleh memburuknya kondisi ekonomi masyarakat akibat inflasi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2022 serta keterbatasan anggaran daerah. Kenaikan harga BBM berdampak langsung terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

Inflasi BBM juga memperburuk kondisi rumah tangga berpenghasilan rendah, yang sebagian besar pendapatannya terserap untuk kebutuhan konsumsi harian.

Pemerintah Bukittinggi melalui program Baling Bambu berusaha memberdayakan semua elemen di dalam masyarakat baik pihak swasta maupun perorangan untuk peduli dan turut memberikan peran dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Sosial berkolaborasi dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi. BPRS (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah) Jam Gadang serta keluarga pioner. Keluarga pioner sendiri merupakan keluarga yang secara sukarela menyalurkan kepada masyarakat miskin. Peran keluarga pioner dalam konteks ini mencerminkan bentuk filantropi berbasis individu atau keluarga, yang bukan hanya berkontribusi dalam bentuk materi, akan tetapi juga dalam bentuk kepedulian sosial.

Dari sisi pendanaan, Program Baling Bambu tidak mengandalkan sumber tunggal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan bersumber dari berbagai kontribusi pihak yang tergabung dalam kolaborasi program. Dana program dihimpun melalui mekanisme filantropi sosial dengan mengajak partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga sosial untuk memberikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Lembaga seperti Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR) Jam Gadang berperan dalam menyediakan dukungan dana maupun barang, sementara keluarga pioner

berkontribusi secara sukarela dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat miskin.

Adapun bantuan yang disalurkan dalam program Baling Bambu adalah sebagai berikut :

1. Bantuan berupa barang dan uang dan/ atau bentuk pemenuhan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Bantuan alat bantu baik untuk lansia ataupun disabilitas.
3. Bantuan biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan cara menjadi orang tua asuh siswa ataupun dengan memberikan bantuan biaya sekolah.
4. Bantuan usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga penerima manfaat.
5. Bantuan kesehatan berupa pengobatan masyarakat miskin.
6. Bantuan untuk melunasi hutang untuk keluarga miskin.
7. Bantuan lainnya yang dirasa dibutuhkan oleh keluarga dan masyarakat miskin.

Pengumpulan dan penyaluran bantuan dalam Program Baling Bambu sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Dinas Sosial melakukan penjajakan awal dan diskusi dengan para pemangku kepentingan guna menggali potensi bantuan serta mengupayakan alokasi anggaran percepatan pengentasan kemiskinan.
2. Dinas Sosial mengoordinasikan kerja sama dengan BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan sektor swasta, yang kemudian dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).

3. Untuk bantuan kepada keluarga pionir, dilakukan pembicaraan khusus yang disepakati bersama dan diketahui oleh pihak kecamatan dan kelurahan.
4. Dinas Sosial bersama mitra terkait memverifikasi kebutuhan serta ketersediaan dana yang bisa digunakan untuk program Baling Bambu.
5. Calon penerima bantuan diverifikasi dan divalidasi berdasarkan data yang tercantum dalam DTKS.
6. Dokumen administrasi disiapkan oleh Dinas Sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
7. Penyaluran bantuan melibatkan Petugas Sosial Masyarakat (PSM), lurah, dan pihak-pihak terkait lainnya.
8. Penerima bantuan akan diberi tanda berupa stiker “Baling Bambu” di rumahnya, sebagai bukti bahwa intervensi pemerintah telah dilakukan.
9. Terakhir, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan untuk menilai efektivitas program.

Sayangnya, saat ini Program Baling Bambu tidak lagi berjalan. Padahal, program ini sejak awal dirancang sebagai langkah strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat sendiri. Namun demikian, kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa keberlanjutan sebuah program sosial tidak hanya ditentukan oleh niat baik dan desain awal yang ideal, melainkan juga oleh kompleksitas hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat bersumber dari beragam aspek, baik internal

maupun eksternal, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keberlanjutan program.

Secara internal, hambatan yang sering muncul antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya komitmen jangka panjang dari pelaksana, serta tidak adanya sistem pendanaan yang berkelanjutan. Selain itu, minimnya partisipasi aktif dari masyarakat, lemahnya perencanaan, pelaksanaan yang tidak terarah, dan kurangnya evaluasi terhadap jalannya program juga menjadi faktor yang turut menghambat. Scheirer (2005) menyebutkan bahwa program yang tidak terintegrasi secara baik dalam struktur lembaga dan terlalu bergantung pada sumber daya dari luar akan sulit untuk bertahan. Hal ini diperkuat oleh Pluye dan Potvin (2007), yang menyatakan bahwa ketika kegiatan program tidak menjadi bagian dari rutinitas organisasi, maka keberlanjutannya akan lemah dan mudah terhenti, walaupun awalnya berjalan cukup baik.

Di sisi lain, faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program. Lennox dkk(2023) menjelaskan bahwa adanya ketergantungan terhadap pendanaan dari pihak luar, lemahnya dukungan pemerintah, serta kondisi sosial politik yang tidak stabil dapat menjadi hambatan besar bagi keberlanjutan suatu program. Ini menunjukkan bahwa meskipun program sudah dirancang dengan matang, jika tidak ada dukungan dari lingkungan eksternal, maka keberlanjutan program akan tetap sulit dicapai.

Program Baling Bambu awalnya dipandang sebagai salah satu inovasi yang baik dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan, ditemukan bahwa salah satu alasan utama

program ini tidak lagi berjalan adalah karena terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. Penelitian mengenai hambatan-hambatan keberlanjutan program ini juga belum pernah dibahas sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan mengenai program ini lebih menyortir tentang implementasi dari program tersebut. Karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh hambatan-hambatan yang membuat program Baling Bambu tidak berlanjut, supaya bisa ditemukan faktor utama yang menyebabkan program ini berhenti.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan telah memberikan berbagai dampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai program pengentasan kemiskinan telah dirancang dan dijalankan oleh pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit program yang mengalami hambatan sehingga tidak dapat berjalan secara berkelanjutan.

Hal ini juga terjadi pada Program Baling Bambu yang diluncurkan Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2023. Program ini awalnya dianggap sebagai langkah yang baik karena melibatkan banyak pihak dan menargetkan masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan. Namun, program ini kemudian tidak lagi berjalan dan terkesan terhenti begitu saja.

Secara umum, keberlanjutan program memang seringkali dihadapkan pada berbagai kendala. Hambatan tersebut bisa berasal dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, perencanaan yang lemah, dan kurangnya pengawasan. Sementara secara eksternal, hambatan dapat berupa rendahnya dukungan dari pihak luar, kurangnya partisipasi masyarakat, atau perubahan

kebijakan. Hambatan-hambatan ini jika tidak ditangani akan menyebabkan program berhenti di tengah jalan dan gagal memberi dampak jangka panjang.

Berdasarkan wawancara awal, ditemukan bahwa salah satu penyebab program ini terhenti adalah lemahnya pengelolaan dan kekurangan SDM yang kompeten. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk menelusuri lebih jauh mengenai penyebab tidak berjalannya kembali program tersebut. Dari uraian di atas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: “Apa saja faktor yang menjadi hambatan keberlanjutan Program Baling Bambu di Kota Bukittinggi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, tujuan penelitian ini yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan faktor yang menjadi hambatan keberlanjutan program Baling Bambu di Kota Bukittinggi

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan tahap-tahap pelaksanaan dalam program Baling Bambu.
2. Mengidentifikasi hambatan keberlanjutan dalam program Baling Bambu.
3. Menganalisis penyebab terjadinya hambatan dalam program Baling Bambu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

- 1) Ikut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosia khususnya jurusan sosiologi dengan studi Masalah Kemiskinan dan Pembangunan .

- 2) Memberikan literatur terkait faktor-faktor penghambat keberlanjutan suatu program di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi program Baling Bambu di Kota Bukittinggi.
- 2) Menjadi referensi bagi organisasi ataupun lembaga lain dalam menjalankan program serupa.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Hambatan Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program menurut Rizkallah dan Bone (1998) adalah keadaan ketika program mampu untuk terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang terhadap masyarakat setelah fase awal implementasi atau setelah pendanaan eksternal suatu program telah berakhir. Keberlanjutan menjadi indikator penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan dan pembangunan. Keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada aspek finansial, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk mempertahankan sumber daya manusia, kelembagaan, serta dukungan sosial yang diperlukan agar program dapat terus berjalan.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan program sering menghadapi berbagai hambatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah hambatan didefinisikan sebagai halangan maupun rintangan.. Sementara Menurut (Hamalik, 1992) Hambatan merupakan segala hal yang dapat merintangangi, menghalangi ataupun menghambat yang ditemui individu dalam kehidupannya

sehari-hari yang datang silih berganti sehingga dapat menimbulkan hambatan bagi individu untuk mencapai tujuannya. Hambatan dapat memberikan pengaruh besar terhadap suatu tugas ataupun pekerjaan. Ia dapat menyebabkan terganggunya hingga berhentinya suatu pelaksanaan tergantung dari seberapa besar dan bisa atau tidaknya suatu hambatan tersebut diatasi.

Hambatan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dari berbagai pihak, hingga lemahnya koordinasi antar pelaksana program. Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak segera diatasi, maka akan berpotensi mengganggu jalannya suatu kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan. Bahkan, dalam beberapa kasus, hambatan dapat menjadi faktor utama terhentinya sebuah program. Oleh sebab itu, setiap pelaksana kegiatan dituntut untuk mampu mengidentifikasi, memahami, serta merumuskan solusi terhadap hambatan yang timbul agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal

Dari konsep konsep diatas, hambatan keberlanjutan dapat diartikan sebagai segala halangan, rintangan, atau faktor penghambat yang mengganggu kemampuan suatu program untuk terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat setelah fase awal implementasi atau setelah pendanaan eksternal berakhir. Dalam konteks penelitian ini, mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut sebagai upaya memahami hambatan keberlanjutan program Baling Bambu.

1.5.2 Tinjauan Sosiologis

Dalam suatu penelitian, teori memiliki kedudukan penting dalam membedah dan menganalisis temuan-temuan di lapangan. Teori membantu memberikan kerangka dalam memahami dan menjelaskan suatu fenomena sosial. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan teori birokrasi Max Weber memahami fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Teori ini diharapkan dapat membedah terkait hambatan keberlanjutan program Baling Bambu di Kota Bukittinggi.

Secara etimologis, istilah birokrasi berasal dari kata *bureaucratie* dalam bahasa Prancis, yang terdiri dari kata *bureau* berarti meja tulis dan *cratin* berarti kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan, birokrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem atau mekanisme yang dirancang untuk menciptakan keteraturan, efisiensi, dan kesinambungan kerja. Birokrasi berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi, di mana pejabat di dalamnya diharapkan bekerja tanpa kepentingan pribadi dan menjalankan perannya berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pengembangan konsep birokrasi adalah Max Weber (1864–1921), seorang sosiolog Jerman yang memperkenalkan model *birokrasi ideal*. Menurut Weber, birokrasi merupakan bentuk organisasi yang paling rasional karena seluruh fungsi dijalankan berdasarkan aturan yang sistematis dan profesional. Teori Weber dikenal luas karena mampu menjelaskan bagaimana organisasi dapat beroperasi secara efisien, objektif, dan terlepas dari kepentingan pribadi. Inti dari gagasan Weber adalah rasionalitas, yaitu cara kerja yang berlandaskan logika dan hukum, bukan tradisi atau hubungan personal.

Weber menggambarkan birokrasi ideal sebagai sistem yang memiliki struktur hierarki vertikal yang ketat dan pembagian kerja yang jelas di setiap tingkatan. Setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, sedangkan jalur komunikasi dan wewenang berjalan secara teratur dari atasan ke bawahan. Dalam pandangan Weber, sistem yang hierarkis ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien karena alur kekuasaan terpusat dan tidak tumpang tindih. Ia juga menegaskan bahwa birokrasi harus bersifat tertutup, artinya kegiatan di dalam organisasi tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan luar agar kinerja tetap stabil dan terkontrol.

Selain struktur hierarkis, Weber juga menekankan pentingnya aturan dan kepastian hukum dalam birokrasi. Ia menyatakan bahwa setiap kegiatan kedinasan harus diatur melalui hukum atau ketentuan administrasi yang jelas. Dengan demikian, setiap tindakan dalam birokrasi memiliki legitimasi formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini menciptakan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan mencegah adanya tindakan yang bersifat subjektif.

Lebih lanjut, Weber merumuskan beberapa karakteristik penting yang menjadi dasar dari birokrasi ideal, antara lain:

1. Prinsip kepastian kedinasan yang diatur melalui hukum. Seluruh kegiatan birokrasi harus dijalankan berdasarkan peraturan dan ketentuan administrasi tertulis. Hal ini untuk memastikan adanya kepastian dan keteraturan kerja dalam setiap proses pemerintahan.

2. Prinsip tata jenjang kedinasan dan tingkat kewenangan. Birokrasi memiliki susunan jabatan yang hierarkis agar tercipta keserasian kerja, keharmonisan, dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan.
3. Manajemen berbasis dokumen tertulis. Setiap kegiatan birokrasi harus didukung oleh dokumen formal agar keputusan dan tindakan administratif dapat dilacak, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.
4. Spesialisasi kerja yang didukung keahlian. Tugas-tugas dalam birokrasi dibagi secara spesifik dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi kerja.
5. Hubungan kerja bersifat impersonal. Interaksi dalam birokrasi dilakukan secara objektif, berdasarkan peraturan, bukan karena hubungan pribadi atau kedekatan sosial.
6. Penerapan kelima prinsip birokrasi tersebut dalam organisasi pemerintahan menunjukkan bahwa seluruh bentuk organisasi publik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas dan mekanisme pemerintahan.

Selain karakteristik tersebut, Weber juga menjelaskan bahwa dalam birokrasi terdapat tiga jenis otoritas yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan, yaitu:

- a) Otoritas tradisional, yaitu kekuasaan yang bersumber dari warisan masa lalu atau kebiasaan yang masih dianggap sah hingga kini. Dalam bentuk ini, hubungan antara atasan dan bawahan bersifat personal.
- b) Otoritas kharismatik, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari sifat pribadi pemimpin yang dianggap memiliki karisma dan mampu menimbulkan

loyalitas pengikutnya. Dalam sistem ini, aturan dan struktur formal cenderung lemah.

- c) Otoritas legal-rasional, yaitu kekuasaan yang bersumber dari sistem hukum dan peraturan yang berlaku. Tipe otoritas inilah yang menjadi dasar dari birokrasi modern, karena mengutamakan rasionalitas, kepastian hukum, dan profesionalisme(Wakhid, 2011).

Teori birokrasi Max Weber digunakan dalam penelitian ini karena Program Baling Bambu merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan yang dijalankan melalui struktur birokrasi. Prinsip-prinsip birokrasi Weber menjadi acuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program Baling Bambu dijalankan sesuai dengan ciri-ciri birokrasi ideal. Dalam konteks ini, digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan yang menyebabkan program tidak berlanjut.

1.5.5 Penelitian Relevan

Setiap penelitian memerlukan landasan berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian. Karya-karya tersebut berfungsi sebagai bahan perbandingan sekaligus acuan dalam proses penelitian. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah judul penelitian yang relevan dengan topik ini.

Pertama Penelitian terdahulu oleh Azis Muslim (Muslim, 2017)berjudul *“Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin”* menjadi acuan yang relevan dalam memahami dinamika kegagalan program pemberdayaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

gagal membangun kemandirian masyarakat miskin disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kinerja fasilitator yang buruk serta miskonsepsi para pemangku kepentingan terhadap tujuan program. Fasilitator seringkali bekerja secara pragmatis, tidak mengikuti prosedur, dan tidak menjalankan peran serta fungsi sebagaimana mestinya. Di sisi lain, para pemangku kepentingan memilih program prioritas yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya mengenai kegagalan program Baling Bambu, yaitu sama-sama mengkaji penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, yaitu objek kajian. Jika penelitian Azis Muslim berfokus pada program berskala nasional (PNPM), penelitian ini lebih menekankan pada program lokal berbasis kolaborasi multi-pihak di Kota Bukittinggi.

Kedua, penelitian Oleh Nella Mirani (2019) dengan Judul *"Faktor Penyebab Kegagalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Hulu Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi Tahun 2016-2017)"*. Menurut penelitian ini terdapat empat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Hulu. Pertama, yang menjadi penyebab utama adalah rendahnya kinerja petugas lapangan. Faktor berikutnya yaitu pemilihan lokasi pemberdayaan yang salah, kurangnya fasilitas dari pemerintah, dan terakhir keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. Penelitian Oleh Mirani dan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang faktor kegagalan suatu program serta sama sama menggunakan konsep pemberdayaan.

Sementara perbedaannya sama seperti penelitian sebelumnya, yaitu objek yang menjadi fokus penelitian.

Selanjutnya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Cahya Wibowo (2024) berjudul *“Masalah Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat pada Program Ekowisata Mangrove Kali Lamong Desa Sukorejo”* mengkaji bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program ekowisata mengalami tantangan dalam aspek keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program awalnya berjalan cukup baik dengan melibatkan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), keberlanjutan program menghadapi sejumlah kendala seperti lemahnya kelembagaan lokal, ketergantungan pada bantuan eksternal, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam jangka panjang.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian saya yang berjudul *“Analisis Kegagalan Program Baling Bambu (Bantu Sekeliling Bantu Semampumu) di Kota Bukittinggi”* terletak pada fokus penelitian yaitu tentang keberlanjutan suatu program pengentasan kemiskinan. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian Bagus Cahya Wibowo berfokus pada konteks pemberdayaan dalam bidang ekowisata berbasis lingkungan di kawasan pesisir, sedangkan penelitian saya berfokus pada program pengentasan kemiskinan berbasis kolaborasi multi-pihak. Selain itu, penelitian terdahulu menekankan pada aspek keberlanjutan program, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada analisis penyebab kegagalan program, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun partisipasi masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif mengacu kepada perspektif teoritis tertentu yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, umumnya yaitu perspektif-perspektif dalam paradigma post-positivistis yang berfokus mengkaji makna dalam suatu fenomena sosial (Afrizal, 2014). Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor yang menjadi hambatan keberlanjutan Program Baling Bambu di Kota Bukittinggi?”. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas serta fenomena sosial mengenai strategi penggalangan dana filantropi pada program Baling bambu tersebut.

Sementara itu, tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah tipe deskriptif. Tipe penelitian ini berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara terperinci mengenai masalah yang diteliti, yaitu Apa saja faktor yang menjadi hambatan keberlanjutan Program Baling Bambu di Kota Bukittinggi?. Dalam melaksanakan penelitian dengan tipe ini, peneliti mencoba mendengar, melihat dan mencatat seobjektif mungkin mengenai fakta dan pengalaman yang dilihat dan dialami oleh peneliti.

Alasan penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif adalah dengan tujuan dapat mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga dapat diketahui bagaimana strategi penggalangan dana serta faktor pendukung penggalangan dana filantropi dalam program Baling Bambu.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai individu-individu yang diyakini memiliki pemahaman mengenai fenomena yang diteliti, yang berperan sebagai sumber informasi bagi peneliti. Sejalan dengan hal tersebut, Afrizal (2014) menyatakan bahwa informan penelitian adalah individu yang menyediakan informasi terkait diri mereka sendiri, orang lain, atau suatu peristiwa tertentu kepada peneliti.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelum penelitian dilaksanakan. Kriteria tersebut menjadi acuan dalam memilih sumber informasi sepanjang penelitian. Informan penelitian dibedakan menjadi informan pelaku dan informan pengamat.

Informan pelaku adalah individu yang menyampaikan informasi mengenai diri mereka sendiri, pengetahuan, tindakan, serta perilaku terkait masalah penelitian. Sementara itu, informan pengamat memberikan keterangan mengenai orang lain, suatu peristiwa, atau hal tertentu kepada peneliti. Kedua jenis informan tersebut dipilih secara purposif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk Informan pelaku dalam penelitian ini, penulis menetapkan ciri sebagai berikut :

- a) Koordinator atau staf teknis dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi yang terlibat sejak awal hingga implementasi program.
- b) Pihak stakeholder/kolaborator program yang mengetahui teknis program Baling Bambu serta terlibat aktif dalam program Baling Bambu.

Sementara itu untuk memahami program dari sisi luar, maka penulis menetapkan kriteria berupa :

- a) Warga miskin Kota Bukittinggi yang pernah menerima bantuan dalam bentuk barang, jasa, pendidikan, kesehatan, atau bantuan ekonomi dari Program Baling Bambu.
- b) Telah merasakan manfaat program minimal satu kali selama program berlangsung (tahun 2023).

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, penulis mencari individu-individu yang sesuai saat melaksanakan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Informan pelaku diantaranya yaitu 3 orang staff Dinas Sosial dan 1 orang dari LKKS, sementara informan pengamat adalah 4 orang penerima bantuan Program Baling Bambu.

Tabel 1. 2
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan/Peran	Kriteria
1	Syanji	Kepala Dinas Sosial	Staff Dinas yang terlibat dalam program
2	Tommy	Sekretaris Dinas Sosial	Staff Dinas yang terlibat dalam program
3	Fauzan	Staff Dinas Sosial	Staff Dinas yang terlibat dalam program
4	Rika	Sekretaris LKKS	Skateholder yang aktif dalam program
5	Linawati	KPM Baling Bambu	Penerima bantuan usaha dan sembako
6	Ijah	KPM Baling Bambu	Penerima bantuan biaya kebutuhan hidup
7	Syarifah	KPM Baling Bambu	Penerima bantuan sembako
8	Desmawati	KPM Baling Bambu	Penerima bantuan alat bantu dengar

Sumber: Data penulis 2025

1.6.3 Data yang Diambil

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dikenal juga sebagai data asli yang bersifat mutakhir. Data primer dapat berupa opini subjek penelitian, hasil observasi terhadap objek, kegiatan, peristiwa, maupun hasil pengujian (Yuniarti dkk., 2023). Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan staf Dinas Sosial, stakeholder, serta keluarga penerima manfaat Program Baling Bambu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara, yang berarti peneliti tidak mengaksesnya langsung dari sumber utama. Data ini telah tersedia sebelumnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan atau sebagai referensi untuk memperkuat analisis penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk media cetak maupun elektronik, artikel ilmiah, dan jurnal yang memuat informasi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data sekunder juga mencakup dokumen resmi, berita, dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Baling Bambu. Dengan demikian, sumber data sekunder penelitian ini meliputi dokumen pemerintah, artikel, jurnal akademik, skripsi, serta literatur buku yang relevan, yang semuanya digunakan untuk mendukung kelengkapan dan ketepatan informasi penelitian.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Sumber data utama pada penelitian ini terdiri atas kata-kata dan tindakan informan, yang kemudian didukung oleh data tambahan seperti dokumen dan sumber relevan lainnya. Data utama yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dicatat secara sistematis menggunakan rekaman audio, video, pengambilan foto atau film, serta catatan tertulis sebagai dokumentasi (Lexy J. Moleong, 2004). Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara komprehensif, penulis menerapkan metode wawancara mendalam guna menggali secara rinci pengetahuan, pengalaman, dan pandangan informan, serta observasi langsung yang memungkinkan analisis konteks dan perilaku yang terjadi di lapangan.

a. Wawancara mendalam

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara peneliti dan informan. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan sejelas mungkin dari subjek penelitian, sehingga peneliti bisa memahami pengalaman, pandangan, serta informasi penting yang dimiliki oleh informan secara mendalam. Tidak seperti percakapan biasa, wawancara memiliki aturan ketat dalam pelaksanaannya. Menurut Kartono (dalam Gunawan, 2022) wawancara dilakukan dengan diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, dimana pewawancara dan informan berhadapan secara fisik.

Sementara wawancara mendalam adalah wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi lebih detail. Wawancara jenis ini bersifat terbuka dan bebas

tetapi tetap diarahkan agar tidak jauh dari fokus penelitian. Dalam melaksanakan wawancara mendalam pewawancara menanyakan tentang berbagai hal berbeda kepada informan yang sama dengan tujuan mengklarifikasi informasi yang didapat dari wawancara sebelumnya (Afrizal, 2014). Teknik wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai faktor penghambat keberlanjutan program Baling Bambu.

Wawancara mendalam telah penulis usahakan kepada seluruh individu yang memungkinkan dan mengetahui program dengan baik. Penelitian ini dimulai pada tanggal 7 Juli, dimana peneliti mengajukan izin penelitian kepada Dinas sosial. Pihak Dinas Sosial menerima surat izin penelitian yang di diperoleh dari Kesbangpol Kota Bukittinggi, dan meminta kotak penulis untuk menghubungi terkait kapan bisa memulai penelitian. Namun, peneliti tidak kunjung di hubungi, sehingga pada tanggal 9 Juli peneliti kembali lagi ke kantor Dinas Sosial, dan tidak sengaja bertemu dengan sekretaris Dinas Sosial, Bapak Tommy Hidayat di depan instasi. Beliau kemudian menanyakan maksud kedatangan penulis, dan setelah di jelaskan beliau bersedia di wawancara. Setelah itu beliau merekomendasikan Bapak Kepala dinas sosial sebagai inovator program untuk di wawancara. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juli, peneliti bertemu dengan Kepala Dinas yang bernama Bapak Syanji. Beliau peneliti temui setelah beberapa jam menunggu dan baru bisa di wawancarai setengah jam sebelum jam operasional Dinas habis, sehingga wawancara tidak bisa peneliti lakukan dengan waktu lama.

Pada tanggal 14 Juli, peneliti melanjutkan penelitian ke LKKS Kota Bukittinggi. Di sana wawancara dilakukan dengan Ibu Rika selaku sekretaris

LKKS. Esok harinya, peneliti meminta data kepada Dinas Sosial mengenai penerima program Baling Bambu. Hari itu peneliti bertemu dengan staff Dinas Sosial bernama Fauzan. Selain memberikan data tersebut, Bang Fauzan juga turut peneliti wawancara. Beliau sangat aktif dalam program ini dan mengetahui seluk beluk program dengan Baik.

Dari beberapa informan yang penulis temui, penulis mendapat informasi bahwa pihak stakeholder selain LKKS tidak terlalu tahu menahu tentang program ini. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk tidak memasukkan mereka sebagai informan, sebab penulis khawatir informasi yang diberikan tidak valid dan dapat mengganggu kredibilitas data. Penulis mencukupi informan pelaku sampai di sana.

!6 Juli peneliti melakukan wawancara dengan dua orang penerima bantuan. Tetapi kemudian setelah dua wawancara tersebut peneliti beristirahat di rumah sembari merevisi bab 1 dan mengerjakan bab 2 di rumah karena kondisi kesehatan yang kurang Baik. Istirahat ini penulis ambil dalam rentang waktu cukup lama hingga tanggal 25 Juli. Pada hari itu penulis telah selesai merivisi dan mengerjakan bab 1 dan 2.

Pada tanggal 26 Juli melanjutkan wawancara kepada dua orang penerima bantuan, yaitu Ibu Erna dan Ibu Syarifah. Ke dua orang ini adalah informan terakhir yang peneliti wawancara. Peneliti merasa bahwa data yang peneliti dapat sudah jenuh dan peneliti menyudahi wawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala gejala fisikal ataupun mental subjek ataupun objek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk

secara langsung mengamati perilaku subjek penelitian dengan menggunakan panca indra (Rukajat, 2018). Metode observasi memungkinkan peneliti untuk secara langsung melihat, mendengar, dan merasakan fenomena yang berlangsung di lapangan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui serta mendalami gerak-gerik para pelaksana, sekaligus memperoleh informasi yang tersebar mengenai implementasi program Baling Bambu di masyarakat luas. Observasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menangkap data secara nyata, kontekstual, dan relevan dengan fokus penelitian, sehingga mendukung validitas dan kedalaman analisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan bahan tertulis. Contohnya berita, notulen rapat, surat-surat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang dibutuhkan (Afrizal, 2014). Dokumentasi yang penulis cantumkan dalam laporan ini adalah berita *online* mengenai program Baling Bambu.

1.6.5 Unit Analisis

Dalam penelitian, hal yang perlu ditentukan secara jelas adalah objek yang berkaitan dengan pertanyaan ‘apa’ atau ‘siapa’, serta ‘tentang apa’ yang menjadi fokus penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikenal sebagai unit analisis, yang menjadi dasar bagi pengumpulan data, karena unit analisis menunjukkan arah dan fokus penelitian. Unit analisis dapat berupa individu maupun kelompok, disesuaikan dengan tujuan penelitian dan pendekatan metodologis yang digunakan. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu individu individu yang pernah terlibat dengan pelaksanaan Baling Bambu.

1.6.6 Analisis Data.

Analisis data pada penelitian kualitatif memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan analisis data pada penelitian kuantitatif. Dalam konteks penelitian kualitatif, proses analisis disebut sebagai analisis berkelanjutan karena dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian berlangsung. Tahapan analisis terdiri dari dua fase utama, yaitu selama pengumpulan data di lapangan dan pada saat penyusunan laporan penelitian. Dengan demikian, analisis data dilaksanakan sejak tahap awal penelitian hingga penelitian selesai, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Analisis data tersebut terbagi menjadi tiga tahap, yakni kodifikasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahapan-tahapan ini akan dijelaskan secara lebih rinci.

Tahap kodifikasi, atau pengkodingan data, merupakan tahap di mana peneliti memberikan penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil dari tahap ini adalah diperolehnya klarifikasi atau tema-tema dari data penelitian. Proses ini dilakukan dengan menulis ulang catatan lapangan, kemudian memilah informasi yang relevan dan tidak relevan melalui pemberian tanda. Selanjutnya, peneliti memfokuskan perhatian pada penggalan data tertulis yang penting sesuai dengan topik penelitian, lalu menginterpretasikan isi penggalan tersebut untuk memahami informasi yang disampaikan oleh informan.

Tahap selanjutnya adalah tahap penyajian data. Pada tahap ini, data temuan yang disajikan adalah berupa pengelompokan atau kategori. Penyajian data yang disarankan Miles dan Huberman adalah matriks dan diagram agar dapat menyajikan hasil penelitian dengan lebih efektif.

Terakhir tahap penarikan Kesimpulan/verifikasi. Ini adalah tahap di mana peneliti menafsirkan temuan yang diperoleh dari wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan ditarik, peneliti memeriksa kembali keabsahan interpretasi dengan meninjau ulang proses kodifikasi dan penyajian data, sehingga dapat dipastikan tidak ada kesalahan (Afrizal, 2014).

1.6.7 Definisi Konsep

1. Kemiskinan

Adalah kondisi kekurangan, atau tidak kecukupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari yang diakibatkan penghasilan seseorang berada di bawah rata-rata.

2. Program Baling Bambu.

Merupakan program percepatan pengentasan kemiskinan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah berjalan sejak tahun 2023.

3. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai kemampuan suatu program untuk terus berjalan dan memberikan manfaat secara berkelanjutan setelah tahap awal pelaksanaannya.

4. Hambatan keberlanjutan Program

ialah segala bentuk kendala atau rintangan yang menyebabkan suatu program tidak lagi dapat terus dilaksanakan.

5. Birokrasi

Adalah sistem organisasi yang berfungsi untuk mengelola perusahaan, pemerintahan ataupun lembaga publik melalui seperangkat aturan atau prosedur yang di dalamnya terdapat hierarki, pembagian kerja yang jelas, hukum dasar dan profesionalisme.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana sebuah akan dilakukan atau setting maupun konteks sebuah penelitian. Lokasi penelitian tidak selalu mengacu pada wilayah saja, tetapi juga organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014). Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Bukittinggi dengan berfokus kepada program Baling Bambu. Adapun alasan pemilihan lokasi adalah karena program ini merupakan inovasi baru dan dapat dikatakan berbeda dengan kebanyakan program pengentasan kemiskinan sehingga ia menarik untuk diteliti. Baling Bambu adalah sebuah program pengentasan kemiskinan yang mengusung konsep filantropi serta kolaborasi dengan multi-pihak. Program ini menghimbau masyarakat yang dirasa berkecukupan untuk turut membantu masyarakat pra-sejahtera serta menggandeng berbagai pihak baik swasta ataupun milik pemerintah dalam usaha pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif pada beberapa titik yang mewakili aktor-aktor dalam program dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung

dengan fokus penelitian. Secara khusus penelitian ini dilaksanakan di tiga lokasi utama, diantaranya :

1. Dinas Sosial Kota Bukittinggi, sebagai lembaga pemerintah yang merancang, mengoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan Program Baling Bambu. Dinas Sosial berperan sentral dalam proses identifikasi penerima bantuan, perencanaan hingga pelaporan program secara formal.
2. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), sebagai lembaga yang berdiri di bawah Dinas Sosial, dan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program seperti halnya pendistribusian bantuan kepada keluarga penerima manfaat.
3. Keluarga penerima manfaat Program Baling Bambu, yaitu masyarakat yang pernah mendapatkan intervensi bantuan dari program tersebut. Informasi dari kelompok ini penting untuk memahami dampak program secara langsung serta kendala-kendala yang mereka alami selama proses pelaksanaan.

Adapun pihak-pihak lain seperti halnya BAZNAS Kota Bukittinggi dan BPR Syariah Jam Gadang, meskipun secara formal tercantum sebagai bagian dari kolaborator program, tidak dijadikan lokasi penelitian. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak Dinas Sosial, diketahui bahwa kedua lembaga tersebut tidak memiliki keterlibatan mendalam dalam operasional teknis Program Baling Bambu, sehingga informasi yang dapat mereka berikan relatif terbatas, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat keakuratan informasi yang dikumpulkan.

1.8 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, dimulai pada bulan April dengan kegiatan seminar proposal yang dilakukan oleh peneliti. Pada dua bulan berikutnya, peneliti melakukan revisi terhadap proposal penelitian sekaligus menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya, pada bulan Juli, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, di mana proses pengumpulan data ini juga diiringi dengan analisis data secara berkelanjutan. Pada periode Agustus hingga September, peneliti melanjutkan penyusunan laporan penelitian, yang sebagian prosesnya telah dimulai sejak bulan Juli. Penelitian ini ditutup dengan pelaksanaan sidang skripsi pada bulan Oktober..

Tabel 1. 3
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2025						
		Apr	Mai	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1	Seminar proposal							
2	Revisi dan menyusun Instrumen Penelitian							
3	Pengumpulan Data							
4	Analisis data							
5	Penulisan Laporan							
6	Sidang skripsi							

Sumber: Data penulis 2025